

**ANALISIS PERAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET
DAN INOVASI DAERAH (BAPPERIDA) DALAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI SIPD (SISTEM
INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH)
(Studi Pada BAPPERIDA Kota Bandar Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

**CHRISYILLA THERESIA SIMANJUNTAK
NPM 2216021092**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

**ANALISIS PERAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET
DAN INOVASI DAERAH (BAPPERIDA) DALAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI SIPD (SISTEM
INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH)
(Studi Pada BAPPERIDA Kota Bandar Lampung)**

Oleh

CHRISYILLA THERESIA SIMANJUNTAK

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

ANALISIS PERAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH (BAPPERIDA) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI SIPD (SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH) (Studi Pada BAPPERIDA Kota Bandar Lampung)

Oleh

CHRISYILLA THERESIA SIMANJUNTAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya keterlambatan dalam penginputan rencana kegiatan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Bandar Lampung, yang berdampak pada keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peran BAPPERIDA sebagai koordinator perencanaan belum sepenuhnya berjalan optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran BAPPERIDA dalam perencanaan pembangunan melalui SIPD menggunakan konsep peran kelembagaan menurut Inu Kencana Syafie (2013), sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen. Informan dalam penelitian ini berasal dari BAPPERIDA serta OPD terkait, yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BAPPERIDA sebagai regulator telah berjalan melalui penetapan pedoman penginputan SIPD, namun belum optimal karena tidak adanya penerapan sanksi terhadap keterlambatan penginputan. Sebagai dinamisator, BAPPERIDA telah berperan aktif dalam melakukan koordinasi dan pengingat kepada OPD, meskipun masih bersifat informal dan belum didukung oleh mekanisme pengawasan yang terstruktur. Sementara itu, peran sebagai fasilitator belum berjalan secara maksimal, ditandai dengan belum adanya pelatihan dan pendampingan teknis yang berkelanjutan bagi OPD sehingga berdampak pada terbatasnya pemahaman operator mengatasi kendala penggunaan SIPD. Keterlambatan penginputan juga dipengaruhi oleh faktor keterbatasan sumber daya manusia, beban kerja operator, serta gangguan pada sistem. Peran BAPPERIDA dalam perencanaan pembangunan melalui SIPD telah terlaksana, namun masih memerlukan penguatan dalam aspek regulator dan fasilitator yaitu pengendalian ketidakdisiplinan OPD dan mekanisme pengawasan melalui pelatihan secara berkala mengenai SIPD.

Kata Kunci: SIPD, Penginputan Rencana Kegiatan, Dokumen Perencanaan, OPD

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE ROLE OF THE REGIONAL DEVELOPMENT, RESEARCH AND INNOVATION PLANNING AGENCY (BAPPERIDA) IN REGIONAL DEVELOPMENT PLANNING THROUGH THE SIPD (REGIONAL GOVERNMENT INFORMATION SYSTEM) (A Study of BAPPERIDA in Bandar Lampung City)

By

CHRISYILLA THERESIA SIMANJUNTAK

This study was motivated by the persistent delays in the entry of activity plans into the Local Government Information System (SIPD) by Regional Government Agencies (OPDs) in Bandar Lampung City, which has resulted in delays in the preparation of development planning documents. This situation indicates that BAPPERIDA's role as a planning coordinator has not yet been fully optimized. This study aims to analyze BAPPERIDA's role in development planning through the SIPD using the institutional role concept proposed by Inu Kencana Syafie (2013), specifically as a regulator, dynamizer, and facilitator. The research design employed is qualitative descriptive, utilizing data collection techniques such as interviews and document analysis. Informants in this study were drawn from BAPPERIDA and relevant OPDs, namely the Community Empowerment Agency and the Labor Agency of Bandar Lampung City. The results indicate that BAPPERIDA's role as a regulator has been implemented through the establishment of SIPD data entry guidelines; however, it remains suboptimal due to the absence of sanctions for late data entry. As a facilitator, BAPPERIDA has actively coordinated and reminded OPDs, although these efforts remain informal and lack support from structured oversight mechanisms. Meanwhile, its role as a facilitator has not been fully realized, as evidenced by the absence of ongoing training and technical assistance for OPDs, which limits operators' ability to overcome challenges in using SIPD. Delays in data entry are also influenced by factors such as limited human resources, operators' workloads, and system disruptions. BAPPERIDA's role in development planning through SIPD has been implemented, but it still requires strengthening in its regulatory and facilitation aspects—specifically, addressing OPD non-compliance and establishing oversight mechanisms through regular training on SIPD.

Keywords: *SIPD, Activity Plan Input, Planning Documents, OPD*

Judul Skripsi : **ANALISIS PERAN BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI
DAERAH (BAPPERIDA) DALAM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
MELALUI SIPD (SISTEM INFORMASI
PEMERINTAHAN DAERAH) (Studi Pada
BAPPERIDA Kota Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Chrisyilla Theresia Simanjuntak**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2216021092

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Syarief Makhya, M.Si.
NIP. 195908031986031003

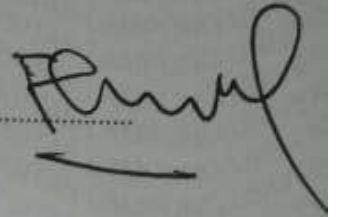
2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Dr. Tabah Maryanah, S.I.P., M.Si.
NIP 197106042003122001

MENGESAHKAN

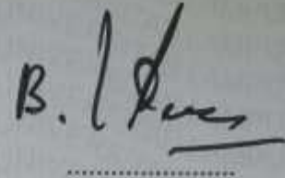
1. Tim Penguji
Ketua

: Prof. Dr. Syarief Makhya, M.Si.



Penguji Utama

: Budi Harjo, S.Sos., M.IP



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustiana Zainal, S.Sos., M.Si.
NIP.197608212000032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 6 April 2026

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 06 April 2026
Yang Membuat Pernyataan



Chrisyilla Theresia Simanjuntak
2216021092

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Chrisyilla Theresia Simanjuntak, dilahirkan di Tarutung, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 08 Januari 2005 dari pasangan Bapak Tunggul Simanjuntak dan Ibu Natalia Lumbantobing. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, memiliki dua adik laki-laki. Pada tahun 2010 penulis memulai Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 177031, kemudian dilanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah pertama (SMP) yaitu di SMP Negeri 3 Tarutung. Pada Tahun 2019, Penulis melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Tarutung. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan di Universitas Lampung pada tahun 2022, melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Selama menempuh Pendidikan S1, Penulis pernah aktif di beberapa kepanitiaan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Kristen maupun Persekutuan Doa Oikumene (PDO) Fisip Universitas Lampung, penulis juga pernah menjadi bagian dari Kepanitiaan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fisip Universitas Lampung sebagai anggota divisi Advokasi. Pada tahun 2025 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Rejomulyo, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan selama 30 hari. Pada tahun yang sama, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kota Bandar Lampung selama 5 bulan 12 hari dan ditempatkan dalam Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

MOTTO

“Ku kan Melihat DIA Jadikan Semua, Terpujilah Tuhan”

*“Everytime I look up, I see God's faithfulness
Don't worry about anything, you have God as your home in this life”*

*“I didn't do it because of the absence of fear,
but in spite of my fear, I did it anyway”*

(Miracle)

**“Bukankah telah Kuperintahkan kepadamu: kuatkan dan teguhkanlah hatimu?
Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau
kemanapun engkau pergi”**

(Yosua 1:9)

PERSEMBAHAN

Dengan Penuh rasa Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan belas kasihNya sehingga Penulis bisa menyelesaikan skripsi ini

Kupersembahkan Karya ini Kepada Kedua orang tua ku terkasih,
Bapak Tunggul Simanjuntak dan Mama Natalia Lumbantobing

Terima kasih untuk setiap doa yang selalu menemani perjalanan ini, cinta, kasih, pengorbanan yang tidak berakhir, menjadi penyemangat dan motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

Kedua Adikku terkasih, Nobel Simanjuntak dan Jordan Simanjuntak,
terima kasih untuk doa, dukungan dan kasih yang diberikan kepada penulis

Kepada Diriku Sendiri,

Terima kasih sudah bertahan dan tetap bertanggung jawab atas apa yang sudah dimulai, sehingga meraih gelar sarjana ini

Kepada Almamaterku Universitas Lampung,

Terima kasih untuk ilmu, pembelajaran yang diberikan kepada penulis selama menempuh Pendidikan di Universitas Lampung

SANWACANA

Puji Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, atas berkat dan Rahmat Nya sehingga penulis bisa sampai di tahap penyelesaian skripsi ini yang berjudul “ANALISIS PERAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH (BAPPERIDA) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI SIPD (SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH) (Studi Pada BAPPERIDA Kota Bandar Lampung)”. Selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini, penulis dibantu dan didukung oleh doa, motivasi, bantuan, saran dan kritik dari berbagai pihak sehingga penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang turut andil mendukung dalam hal moral dan materil. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dengan rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih yang terdalam kepada kedua orang tuaku terkasih, Bapak Tunggul Simanjuntak dan Ibu Natalia Lumbantobing. Orang tua yang sama yang mendoakan penulis dari awal memulai perkuliahan hingga akhir perkuliahan ini, terima kasih untuk setiap doa yang selalu mengalir, cinta dan kasih sayang yang selalu memenuhi hati penulis, pengorbanan yang tidak pernah berakhir serta contoh baik dalam kehidupan penulis. Terima kasih selalu mengusahakan segala sesuatu untuk penulis, di saat penulis merasa ragu untuk melangkah dan merasa hilang arah, kalian adalah alasan penulis untuk tetap melanjutkan perjuangan ini. Terima kasih selalu hadir dalam setiap perjalanan penulis, kupersembahkan gelar ini kepada kalian Mak, Pak. Semoga Tuhan selalu memberkati dan

melimpahkan kesehatan, kebahagiaan dan umur yang Panjang untuk Bapak dan Mamak.

2. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Lampung.
3. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal Z., S.Sos., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Tabah Maryanah, S.I.P., M.Si. selaku ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Bapak Prof. Dr. Syarief Makhya, M.Si. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi penulis, penulis menyampaikan terima kasih yang tulus untuk waktu yang diluangkan selama proses bimbingan, saran, kritik, arahan yang sangat bermanfaat kepada penulis selama proses penyusunan skripsi. Terima kasih Prof, telah sabar membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kiranya Bapak beserta keluarga selalu dalam perlindungan Tuhan, selalu diberikan kesehatan dan senantiasa dilancarkan segala urusannya.
6. Bapak Budi Harjo, M.IP. sebagai Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Penguji Skripsi penulis, terima kasih yang tulus untuk waktu, saran dan kritik, bimbingan dan arahan yang sangat berharga bagi penulis. Terima kasih pak, atas kebaikan serta keramahan yang selalu diberikan kepada penulis ketika diskusi tentang perkuliahan sejak awal hingga akhir semester maupun ketika bimbingan skripsi. Semoga Bapak beserta keluarga selalu dalam perlindungan Tuhan dan senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalani aktivitas.

7. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung. Terima kasih untuk setiap ilmu, nasihat dan dukungan yang diberikan kepada penulis selama menempuh Pendidikan di Jurusan Ilmu Pemerintahan.
8. Kepada kedua adikku terkasih, Nobel Simanjuntak dan Jordan Simanjuntak, terima kasih untuk setiap kebaikan dan ketulusan hati kalian, meskipun kita terbiasa berbicara dari hati ke hati, penulis tahu di balik keheningan itu tersimpan doa dan harapan yang tidak pernah putus. Semoga penulis bisa menjadi kakak yang selalu hadir dalam setiap cerita hidup kalian, semoga persaudaraan ini menjadi tempat kita untuk selalu berbagi cerita dan menjadi tempat pulang paling aman sampai kapanpun. Kemanapun kita melangkah, semoga selalu dikelilingi orang-orang yang selalu mendukung kita untuk naik lebih tinggi.
9. Sahabat-sahabatku terkasih, Yanti Hutabarat, Berliana Simanjuntak dan Idahana Simanjuntak mulai dari masa anak-anak hingga saat ini dan *still counting guys*, terimakasih sudah menjadi sahabat rasa saudara. Terima kasih untuk setiap dukungan, tawa dan canda, momen yang dihabiskan bersama, serta setiap cerita yang tidak ada habisnya, kalian salah satu penyemangat penulis untuk pulang ke kampung. Meskipun penulis sudah merantau, tetapi ketika pulang selalu ada hal-hal yang akan kita bagikan dan kita jalani bersama. Semoga selalu dilancarkan setiap Pendidikan maupun aktivitas yang kita lakukan.
10. Kepada Tarutung *pride* ku, Kak Miranda, Kak Nurti, Kak Septa, Kak Ning dan Ingrid. Terima kasih untuk setiap bantuan, kepedulian dan semangat yang diberikan kepada penulis selama menjalani perkuliahan serta momen yang kita habiskan bersama. Kepada Kak Septa dan Kak

Ning, terima kasih sudah menemani penulis melakukan penelitian untuk skripsi ini, dan terima kasih untuk setiap bantuan dan kebaikan yang diberikan kepada penulis mulai dari awal hingga saat ini. Kepada Kak Nurti, terima kasih untuk kebaikan dan energi keceriaan yang dibagikan kepada penulis. Kepada Ingrid, terima kasih untuk kebaikan dan kepedulian menanyakan keadaan penulis. Kepada Kak Miranda, terima kasih untuk kebaikan hati, bantuan serta kepedulian terhadap penulis, untuk berbagi keluh kesah mulai dari kos hingga ngontrak bersama, penulis merasa memiliki kakak Perempuan selama berkuliah. Meskipun kita berasal dari kota yang sama tetapi penulis bersyukur kita dipertemukan di tempat rantau ini, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam mencapai cita-cita kita.

11. Saudari Maysa Naibaho, Terima kasih sudah menjadi teman penulis mulai dari awal memulai perkuliahan hingga akhir perkuliahan ini, terima kasih untuk momen serta cerita yang kita bagikan bersama seputar perkuliahan hingga kehidupan perantauan, semoga kita selalu memiliki hubungan baik meskipun sudah berpisah untuk mencapai impian kita masing-masing. Penulis bersyukur dipertemukan dengan teman berbagi keluh kesah, canda dan tawa selama perkuliahan ini.
12. Kepada Teman-Teman perkuliahanku Nyoman Trilia, Aini, Montestia, Desmyranda, Elfira dan Dewi, Terima kasih atas semangat dan motivasi yang diberikan ketika kita bertemu, terima kasih atas bantuan dan kepedulian yang sudah diberikan kepada penulis selama perkuliahan dan terima kasih sudah menjadi teman yang baik serta tempat berbagi keluh kesah bersama selama perkuliahan. Semoga kita masih memiliki hubungan yang baik meskipun ketika sudah dipisahkan oleh jarak. Penulis bersyukur dipertemukan dengan kalian di perkuliahan ini.
13. Kepada Teman Magang penulis di BAPPERIDA Kota Bandar Lampung serta teman seperbimbingan skripsi yaitu Rahmatul Hidayah,

Dwi Mulyanti, Ghazy dan Raeycita. Terima Kasih untuk setiap momen kebersamaan selama magang maupun cerita keluh kesah dan canda tawa yang kita bagikan selama proses bimbingan di Gedung Pasca Sarjana Fisip. Teruntuk saudari Rahmatul Hidayah, teman baik penulis mulai dari masa magang hingga saat ini, terima kasih untuk kebaikan, doa dan kepedulian yang diberikan kepada penulis, untuk setiap bantuan dan bertukar pikiran selama proses penyusunan skripsi ini, itu sangat berarti bagi penulis dan akan selalu diingat. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kelancaran mencapai impian kita masing-masing.

14. Kepada Keluarga Oppung Theresia Simanjuntak, terima kasih untuk setiap doa, kehangatan, kepedulian dan kebaikan yang diberikan kepada penulis. Kepada Opung, terima kasih sudah mendoakan penulis menjadi anak yang berhasil, terima kasih untuk setiap canda tawa yang membuat penulis semangat menjalani perkuliahan ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kelancaran dalam aktivitas kita.
15. Kepada Keluarga Oppung Valentina Lumbantobing, terima kasih untuk setiap doa, kehangatan, kepedulian dan kebaikan yang diberikan kepada penulis, terimakasih untuk dorongan dan dukungan yang menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kelancaran dalam aktivitas kita.
16. Kepada Ibu dan Bapak Bidang Rendalev di BAPPERIDA Kota Bandar Lampung, Ibu Kokriyati, Ibu Yuliyanti, Ibu Ayatina, Ibu Leni, Mba Tia, Pak Rozi, Pak Gandi, Pak Sarladi. Terima kasih untuk kebaikan hati dan kepedulian yang diberikan kepada penulis selama mengikuti magang kurang lebih 5 Bulan 12 hari di BAPPERIDA, penulis merasakan kehangatan dan menerima pembelajaran baru sebagai bekal untuk memasuki dunia kerja. Penulis bersyukur bisa diterima dan pernah menjadi bagian dari BAPPERIDA Kota Bandar Lampung,

semoga Ibu dan Bapak semua diberikan kesehatan dan kelancaran dalam melaksanakan pekerjaannya.

17. Kepada Teman-teman Jurusan Ilmu Pemerintahan Angkatan 2022, terima kasih untuk kebersamaan yang baik dan sudah menjadi bagian dari cerita perkuliahan penulis.
18. Terima kasih terhadap orang-orang yang membantu dan turut andil dalam kelancaran dan keberlangsungan perkuliahan penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
19. Untuk Almamaterku Universitas Lampung, terima kasih untuk kesempatan dan ilmu yang diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Universitas Lampung. Semoga Universitas Lampung kedepannya semakin maju dan melahirkan generasi yang berintegritas, berpotensi dan berdaya saing.
20. Untuk diriku sendiri, terima kasih untuk tetap melangkah meskipun belum tahu kemana arah ini membawa. Tahun 2025 barangkali banyak hal tak terduga, terima kasih tetap bertahan dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Terima kasih bisa *survive* selama merantau meskipun jalannya terasa berat, untuk itu kemanapun langkahmu selanjutnya semoga tidak pernah lupa minta penyertaan Tuhan dalam hidupmu, karena Dia akan menjadikan semua yang terbaik dalam hidupmu.

Bandar Lampung, April 2026

Chrisyilla Theresia Simanjuntak

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian	13
1.4.1 Manfaat Teoritis	13
1.4.2 Manfaat Praktis	14
II. TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Konsep Peran Kelembagaan	15
2.2 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	22
2.3 Perencanaan Pembangunan Daerah	27
2.4 Kerangka Pikir	34
III. METODE PENELITIAN	38
3.1 Jenis Penelitian	38
3.2 Fokus Penelitian	39
3.3 Lokasi Penelitian	39
3.4 Sumber Data	39

3.4.1 Data Primer	40
3.4.2 Data Sekunder	40
3.5 Teknik Pengumpulan Data	40
3.5.1 Wawancara	41
3.5.2 Studi Dokumen	42
3.6 Teknik Analisis Data	42
3.6.1 Reduksi Data	43
3.6.2 Penyajian Data	43
3.6.3 Penarikan Kesimpulan	44
3.7 Teknik Keabsahan Data	44
3.7.1 Triangulasi Sumber	45
3.7.2 Triangulasi Teknik	45
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	46
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi daerah Kota Bandar Lampung	46
4.1.1 Profil BAPPERIDA Kota Bandar Lampung	46
4.1.2 Fungsi dan Tugas Pokok BAPPERIDA Kota Bandar Lampung	47
4.2 Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung	49
4.2.1 Profil Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung	49
4.2.2 Fungsi dan Tugas Pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung	50
4.3 Gambaran Umum Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung	52
4.3.1 Profil Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung	52
4.3.2 Fungsi dan Tugas Pokok Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung	52
4.4 Temuan Penelitian Peran BAPPERIDA Sebagai Regulator	54

4.4.1 Pedoman Penginputan Rencana Kegiatan.....	55
4.4.2 Tidak diberlakukan Sanksi Keterlambatan	55
4.5 Temuan Penelitian Peran BAPPERIDA Sebagai Dinamisator	58
4.5.1 Koordinasi BAPPERIDA terhadap OPD	59
4.6 Temuan Penelitian Peran BAPPERIDA Sebagai Fasilitator	61
4.6.1 Tidak ada Pelatihan dan Bimbingan Teknis.....	62
4.7 Analisis Pembahasan.....	70
4.7.1 BAPPERIDA sebagai Regulator	71
4.7.2 BAPPERIDA sebagai Dinamisator	77
4.7.3 BAPPERIDA sebagai Fasilitator	81
4.7.4 Kelemahan SIPD dalam Perspektif <i>Good Governance</i>	88
V. SIMPULAN DAN SARAN	91
5.1 Simpulan	91
5.2 Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	94

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1 Data Informan Wawancara Penelitian SIPD BAPPERIDA Kota Bandar Lampung	41
2 Matriks Hasil Penelitian.....	68
3 Data Organisasi Perangkat Daerah di Kota Bandar Lampung.....	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Detail program kegiatan yang diinput OPD ke dalam SIPD	8
2 Model Perencanaan (Mahi dan Trigunarso).....	34
3 Kerangka Pikir Penelitian	37
4 Struktur Organisasi BAPPERIDA Kota Bandar Lampung.....	49
5 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung	51
6 Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung.....	54
7 Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung Perihal Penginputan dalam SIPD.....	72

DAFTAR SINGKATAN

Bappeda	: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Bappelitbangda	: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
BAPPERIDA	: Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
BPBD	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BPKAD	: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
BPSDM	: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
Kemendagri	: Kementerian Dalam Negeri
Musrenbang	: Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
Perda	: Peraturan Daerah
Perkada	: Peraturan Kepala Daerah
Permendagri	: Peraturan Menteri Dalam Negeri
Perwali	: Peraturan Walikota
Pokir	: Pokok-Pokok Pikiran
PPK	: Pejabat Pembuat Komitmen
PPTK	: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Renja	: Rencana Kerja
RI	: Republik Indonesia
RKPD	: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJPD	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
SDM	: Sumber Daya Manusia
SE	: Surat Edaran

SIPD : Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
SOP : Standar Operasional Prosedur
UU : Undang-Undang
UUD : Undang-Undang Dasar

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia (Permendagri, 2014). “Pembangunan bisa terlaksana secara menyeluruh terarah dan terpadu, maka perlu adanya suatu perencanaan yang cukup matang yang disesuaikan dengan tujuan ingin dicapai agar apa yang hendak dilaksanakan benar-benar terwujud dengan baik” (Brigette Lantaeda dkk, 2002).

Sebelum dilaksanakan pembangunan, tentunya ada perencanaan yang matang untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat dalam bentuk kebijakan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan. Tarigan dalam Manghayu (2018) mengatakan bahwa “Perencanaan adalah proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang.”

“Perencanaan pembangunan daerah haruslah disokong dengan implementasi pemerintahan daerah yang merata dan berkesinambungan dengan arah pembangunan yang terencana dengan baik dan dinamis” (Brigette Lantaeda dkk, 2002). Perencanaan yang baik sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya yang memadai, baik berupa sumber daya manusia (SDM) maupun

sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pembangunan. Koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai penggerak pembangunan menjadi faktor penting agar tahapan proses perencanaan dapat terlaksana dengan optimal. Hal ini diperlukan untuk menyatukan berbagai urusan pemerintahan lintas bidang yang selanjutnya dipadukan ke dalam output dokumen perencanaan, sesuai dengan kebutuhan lokal dan kepentingan nasional (Syarifuddin, 2024).

Pemerintah memiliki badan yang secara khusus mengatur koordinasi perencanaan pembangunan melalui rencana kerja setiap OPD dalam mencapai tujuan dan menyelesaikan permasalahan sesuai dengan aspirasi masyarakat, forum musrenbang di tingkat desa dan kecamatan maupun survey secara langsung oleh dinas terkait yaitu Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) atau Badan Perencanaan Pembangunan daerah (Bappeda) sebagai koordinator perencanaan pembangunan di suatu daerah.

Fungsi BAPPERIDA yang tertuang dalam Peraturan Walikota (Perwali) Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung, Pasal 3 ayat (2) huruf a-d yaitu:

- a. melaksanakan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan, riset, dan inovasi sesuai dengan kewenangan daerah;
- b. menjalankan fungsi koordinasi dalam perencanaan, riset, dan inovasi antar pihak yang terkait di daerah;
- c. melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan, riset, dan inovasi, serta menyusun laporan atas pelaksanaan tugas dukungan teknis BAPPERIDA;
- d. memberikan pembinaan teknis dalam pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan, riset, dan inovasi.

BAPPERIDA sebagai pilar dalam koordinasi antar OPD untuk menyusun dan melaksanakan perencanaan pembangunan di segala aspek melalui dokumen perencanaan seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD). Sehingga peran BAPPERIDA sangat strategis dan penting, seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD Pasal (4) huruf a-d Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah dengan prinsip - prinsip, meliputi:

- a. menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. disusun dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan sesuai dengan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. memadukan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah agar berjalan selaras;
- d. dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi serta potensi yang dimiliki setiap daerah, serta mengikuti dinamika perkembangan baik di tingkat daerah maupun nasional.

Pemerintah daerah melalui badan/dinas terkait perencanaan pembangunan dan pelaksanaan urusan pemerintahan bersifat wajib dan pilihan melakukan koordinasi terkait perencanaan pembangunan yang tersistem dan terstruktur sehingga memudahkan perencanaan sesuai dengan prinsip pembangunan nasional dan kebutuhan daerah. Sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 274, “perencanaan pembangunan daerah wajib didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)”. SIPD merupakan

amanat dari UU 23 Tahun 2014 Pasal 391 dimana Pemerintah Daerah wajib menyediakan Informasi Pemerintahan Daerah, yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (*Sosialisasi SIPD RI – BPSDM Provinsi Riau*). Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat (67) yaitu “Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah”.

“SIPD merupakan sistem berbasis web yang menyediakan data terkini dan dapat diakses melalui situs resmi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Setiap daerah wajib menggunakan sistem tersebut untuk memonitor, mengontrol dan evaluasi secara *real-time* (Putri & Falah, 2024)”. Dengan demikian, penginputan data rencana kerja (Renja) oleh OPD ke dalam SIPD menjadi langkah krusial yang harus dilakukan secara tepat waktu dan berjenjang untuk memastikan akurasi dan kelengkapan data. Penggunaan SIPD tersebut sebagai transformasi perencanaan dan penyimpanan program secara manual ke dalam sebuah sistem elektronik.

Hal tersebut didukung oleh pernyataan Sudianing (2020) mengatakan “dalam upaya menelusuri berbagai potensi dan permasalahan yang ada di era digital ini tidak cukup dieksplorasi melalui data manual, yang tentunya sangat terbatas, dan memerlukan waktu yang lama, sehingga program pembangunan yang memerlukan tindakan cepat dan tepat tidak dapat terwujud dengan baik. Oleh sebab itu, diperlukan cara yang lebih tepat, yaitu melalui sajian data elektronik, yang dapat dipercaya dan dikelola oleh lembaga yang resmi dan berwenang, serta memiliki kemampuan dalam menyajikan dan menganalisis berbagai sajian data elektronik”.

Sudianing dan Seputra menjelaskan bahwa SIPD berfungsi sebagai alat penting untuk meningkatkan akuntabilitas publik, karena sistem ini mendukung transparansi informasi, evaluasi kinerja pemerintah, serta perencanaan program pembangunan jangka panjang serta target pencapaiannya (Putri & Falah, 2024).

Dengan kehadiran SIPD, proses pemantauan perubahan terkait data pembangunan daerah menjadi jauh lebih mudah dan cepat, memberikan informasi perencanaan yang lebih akurat serta terstruktur dibandingkan secara manual yang sering kali kurang efisien. Pemanfaatan Teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai alternatif dan alat bantu yang memudahkan SDM, bukan sekedar formalitas untuk memenuhi tuntutan administratif.

Sistem tersebut diprogramkan oleh pemerintah pusat melalui Kemendagri agar memudahkan pekerjaan dan perencanaan oleh daerah. Diperlukan kerjasama, koordinasi dan pemahaman antar OPD di daerah untuk menjalankan SIPD tersebut, sehingga pekerjaan lebih mudah dibandingkan secara manual. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Pasal 7 ayat (1) mengenai informasi pembangunan daerah tertulis bahwa “SIPD memuat mengenai data perencanaan pembangunan daerah, analisis profil pembangunan daerah serta informasi pembangunan daerah lainnya”. Tujuan dari sistem ini untuk mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah kabupaten kota dalam rangka mempercepat pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang kreatif, kualitas tinggi, efisien sesuai dengan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 (Syarifuddin, 2024).

Pemerintah Daerah wajib menyediakan data mengenai informasi pembangunan daerah sesuai dengan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 391 ayat (1) huruf a. Hal ini juga untuk memenuhi Pasal 14 Ayat (2) Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 sebagai landasan bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam bentuk RKPD, RPJMD, dan RPJPD mengingat fungsi BAPPERIDA secara normatif, sebagai koordinator penyusun kebijakan secara makro dari setiap program kegiatan OPD. SIPD menjadi alat bantu dan kebutuhan untuk melaksanakan administrasi dan penyimpanan data perencanaan pembangunan daerah, sehingga perencana setiap OPD harus memahami alur perencanaan hingga pengisian program

kegiatan, hal ini akan mempengaruhi kualitas dan ketepatan dari penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahunan.

Penginputan setiap rencana kerja/program kegiatan OPD ke dalam SIPD sebagai bahan untuk menetapkan dokumen perencanaan tahunan dalam penganggaran dan pelaksanaan rencana kegiatan. Setiap kepala dinas, kepala bidang hingga staf perencana di OPD memiliki kewajiban untuk mengakses SIPD, sebagai bagian dari tugas nya dalam hal ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam menyusun Rancangan Anggaran Biaya untuk melaksanakan rencana program kegiatan serta memastikan kesesuaian isian dari rincian program kegiatan dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian diperlukan pemahaman yang memadai mengenai fitur serta alur pengisian SIPD agar SDM di OPD dapat menginput data secara tepat dan sesuai ketentuan.

Berikut beberapa tahapan alur perencanaan pembangunan yang nantinya akan diinput ke dalam SIPD, berdasarkan hasil wawancara bersama BAPPERIDA Kota Bandar Lampung:

1. Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) Desa/Kelurahan: Penjaringan aspirasi masyarakat di tingkat paling bawah.
2. Musrenbang Kecamatan: Rekapitulasi dan verifikasi usulan dari kelurahan yang akan dibawa ke tingkat kota.
3. Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah: Organisasi Perangkat Daerah menyelaraskan usulan masyarakat rancangan Rencana Kerja (Renja) OPD.
4. Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota: Penyelarasan antara rancangan RKPD dengan usulan masyarakat, pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD, dan prioritas pembangunan provinsi/nasional.
5. Penetapan RKPD: Setelah verifikasi dan asistensi, RKPD ditetapkan melalui Perkada (Peraturan Kepala Daerah).

Setiap tahapan perencanaan dan musrenbang di atas akan diinput ke dalam SIPD oleh Kelurahan, Kecamatan hingga OPD di Kota Bandar Lampung. Setiap tahapan yang diinput di atas akan berdampak terhadap hasil akhir yaitu penetapan RKPD, sehingga pentingnya kesesuaian jadwal dan tahapan penginputan oleh pihak mulai dari tingkat kelurahan hingga OPD.

Beberapa hal yang di input OPD ke dalam SIPD sebagai berikut:

- a. Maksud, Tujuan dan Sasaran dalam dokumen Renstra OPD (Rencana Strategis) OPD yang selaras dengan RPJMD.
- b. Program, Kegiatan, dan Sub-Kegiatan.
- c. Indikator Kinerja dan Target: Input mengenai *Output* (hasil langsung) dan *Outcome* (dampak) di setiap program kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan.

The screenshot shows a mobile application interface for budget management. The title is "Lihat Sub Kegiatan Belanja". The form contains the following fields:

- SKPD atau Sub Unit ***: SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
- Prioritas Pembangunan Provinsi**: Pemantapan Ketahanan Sosial Budaya dan Harmonisasi Ma
- Prioritas Pembangunan Kota/Kabupaten**: 3. Penguatan ketahanan sosial budaya melalui pemanfaatan
- Sub Kegiatan ***: 1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman
- Label (Tag) Sub Kegiatan**: (empty)
- Sumber Dana**: 1.1 PENDAPATAN ASLI I, Rp 50,000,000
- Lokasi Pelaksanaan Kegiatan**: Kota Bandar Lampung
- Rincian Lokasi**: Kota Bandar, (empty), (empty)
- Waktu Pelaksanaan**: Januari, S/D, Desember
- Anggaran Sub Kegiatan**: Rp 50,000,000
- Anggaran N+1 Sub Kegiatan**: Rp 67,632,000
- Anggaran N+2 Sub Kegiatan**: (empty)

MASYARAKAT			
1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Kertertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Kertertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	50,000,000.00	0.00	0.00 %
1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertaman dan Kertertiban Umum	50,000,000.00	0.00	0.00 %
1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Kertertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamatan, dan Pengawasan	80,000,000.00	0.00	0.00 %
1.05.02.2.01.0016 Peningkatan Arah Gangguan Ketenteraman dan Kertertiban Umum berdasarkan Peta dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	50,000,000.00	0.00	0.00 %
1.05.02.2.01.0017 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	10,000,000.00	0.00	0.00 %
1.05.02.2.01.0025 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	120,000,000.00	0.00	0.00 %
1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota			
1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	70,000,000.00	0.00	0.00 %

Gambar 1. Detail program kegiatan yang diinput OPD ke dalam SIPD

Sumber: BAPPERIDA Kota Bandar Lampung (2026)

Dalam level Organisasi Perangkat Daerah, program rencana kegiatan di OPD hingga biaya yang disusun oleh PPK dan PPTK yaitu Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang akan diinput ke dalam SIPD dan dilakukan pemeriksaan dan kebenaran sesuai ketentuan oleh pejabat Fungsional Perencana OPD. Setiap level di OPD memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam SIPD. Namun berdasarkan wawancara dengan operator SIPD di BAPPERIDA Kota Bandar Lampung, masih terdapat SDM yang kurang memahami alur pengisian serta tahapan pengisian program kegiatan di SIPD yang mengakibatkan keterlambatan penginputan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan BAPPERIDA ke dalam SIPD.

Kurangnya pemahaman SDM pelaksana dalam memahami SIPD berdampak pada tahapan perencanaan pembangunan yang diinput oleh OPD ke dalam sistem. Dari hasil wawancara bersama operator SIPD BAPPERIDA, OPD yang terlambat dalam menginput program rencana kegiatan di Kota Bandar Lampung yaitu, Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Tentunya keterlambatan 2 OPD tersebut menarik untuk diteliti, agar dapat diketahui faktor-faktor yang menghambat OPD dalam melakukan penginputan rencana kegiatan pada SIPD. Mengingat setiap data yang diinput oleh OPD menjadi

bahan penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan tahunan, keterlambatan tersebut berdampak terhadap tahapan penyusunan oleh BAPPERIDA dalam menetapkan rancangan akhir dokumen perencanaan seperti RKPD.

Sistem ini diprogramkan oleh Kemendagri yang diserahkan kepada Badan Perencanaan di setiap daerah dalam memantau dan melaksanakan pelatihan terhadap SDM pelaksana SIPD. Kita juga akan mengetahui bagaimana BAPPERIDA Kota Bandar Lampung sebagai koordinator tingkat Kota dalam koordinasi dan memantau serta memberikan peringatan terhadap setiap OPD agar melaksanakan penginputan sesuai jadwal. Hal tersebut menjadi hal yang menarik untuk diteliti, untuk mengetahui peran BAPPERIDA dalam memberikan peringatan, dorongan terhadap ketepatan pengisian SIPD. Mengingat program kegiatan yang diinput dalam SIPD sebagai bahan dari kualitas perencanaan yang baik bukan sekedar kerja administratif untuk memenuhi instruksi Kemendagri.

Penginputan ke dalam SIPD tersebut tidak lepas dari keterlibatan tugas fungsi BAPPERIDA Kota Bandar Lampung sebagai lembaga yang melaksanakan pembinaan teknis penyelenggaraan dalam perencanaan pembangunan daerah. Keterlambatan dan ketidakdisiplinan OPD dalam mengisi rencana kegiatan pada SIPD berdampak terhadap penyusunan perencanaan pembangunan yang menjadi rencana kerja Pemerintah Kota Bandar Lampung serta OPD untuk tahun berikutnya. Apabila BAPPERIDA tidak memberikan pelatihan maupun sanksi tegas kepada OPD yang terlambat melakukan penginputan data pada SIPD, maka BAPPERIDA perlu meningkatkan pengawasan dan memberikan peringatan kepada OPD. Hal ini penting sebagai tugas dan tanggung jawab BAPPERIDA dalam memberikan pembinaan teknis terkait penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan serta riset dan inovasi daerah, sebagaimana tercantum dalam Tugas dan Fungsi pada Perwali Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2024.

Penelitian terdahulu oleh Putri dan Falah yang berjudul “Analisis Implementasi Aplikasi SIPD RI Terhadap Pengelolaan Keuangan Dalam Pelaksanaan Belanja Daerah pada BPKAD Kabupaten Jayapura” dengan metode studi literatur dengan sumber data sekunder. Penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Jayapura dalam pengelolaan anggaran melalui SIPD memiliki tantangan yaitu kurangnya keterampilan teknis pegawai BPKAD dalam mengoperasikan SIPD akibat pelatihan yang kurang sehingga mempengaruhi keakuratan dan kelancaran pengelolaan keuangan daerah, keterlambatan dalam pelaporan, kurangnya transparansi dalam pelaksanaan belanja daerah yang berpengaruh terhadap akuntabilitas dan pengawasan serta jaringan dan fasilitas di BPKAD Jayapura belum mendukung penggunaan SIPD. Penelitian terdahulu ini fokus pada penggunaan SIPD terhadap pengelolaan anggaran oleh BPKAD Jayapura sedangkan penelitian ini terhadap peran SDM pelaksana SIPD dalam penginputan program kegiatan sebagai dasar informasi pembangunan daerah di Kota Bandar Lampung.

Penelitian yang dilakukan oleh Tumija dan Prayoga Arif Herlambang pada tahun 2023 yang berjudul “Implementasi SIPD dalam Perencanaan Anggaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, yang datanya didapatkan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan implementasi SIPD dalam perencanaan anggaran di Kabupaten Ogan terkhusus dalam perencanaan anggaran berjalan baik, tetapi beberapa faktor penghambat mulai dari SDM kurang memahami penggunaan SIPD, aplikasi kurang fleksibel hingga server dan jaringan yang kurang sehingga memperlambat kinerja dalam aplikasi apalagi ketika dalam waktu penyelesaian input data di SIPD. Koordinasi antar OPD yang masih kurang, tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) maupun standar sarana dan prasarana. Meskipun begitu, upaya yang dilakukan mengatasi hambatan dalam penggunaan SIPD adalah memperbaharui perangkat dan jaringan serta melakukan diskusi dengan OPD di kabupaten OKU. Selain perencanaan

anggaran, penelitian ini juga berfokus terhadap permasalahan teknis dari SIPD yang memperlambat proses penginputan.

Penelitian terdahulu oleh Wurara dkk, pada tahun 2022 yang berjudul “Efektivitas Penerimaan SIPD Dalam Perencanaan Pembangunan di Kota Tomohon”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan sumber data yang digunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPD dalam pembangunan di Kota Tomohon sangat inovatif dan membantu efisiensi penyusunan perencanaan pembangunan secara elektronik dan integrasi antara pusat dan daerah tetapi terdapat pula kekurangan dalam penerapan yaitu indikator yang belum terpenuhi akibat perubahan dasar hukum, sosialisasi dan pelatihan yang kurang oleh pusat serta keterbatasan sarana yang digunakan.

Selanjutnya penelitian oleh Dione dkk, pada tahun 2020 yang berjudul “Implementasi SIPD dalam Meningkatkan Koordinasi Pembangunan di Daerah (Studi tentang Penerapan SIPD Pada BAPPEDA Kota Bengkulu)”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang dimana data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan implementasi SIPD telah berlaku dan diterapkan sesuai peraturan tetapi kendala umum yang sering terjadi dalam sebuah instansi yaitu mengenai SDM, pelaksana SIPD yang belum melaksanakan tugas dan kewajiban pengisian data di SIPD dan tidak adanya sanksi administratif apabila pelaksana SIPD tidak melakukan tugas sebagaimana seharusnya. Perbedaan dalam penelitian ini adalah lokasi penerapan SIPD dan fokus penelitian di BAPPERIDA Bengkulu yaitu keterisian data dalam SIPD sementara penelitian ini fokus pada pengisian data SIPD oleh SDM dalam perencanaan pembangunan kota Bandar Lampung.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Afifah dkk, pada tahun 2023 yang berjudul “Implementasi SIPD dalam menunjang perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Wonosobo”. Penelitian ini menggunakan metode

deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPD di Kabupaten Wonosobo memberikan dampak dan perubahan dari manual hingga menggunakan sistem dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Tetapi masih ditemukan hambatan seperti SOP dari pemerintah pusat mengenai teknis penggunaan SIPD, server yang eror, jaringan internet yang belum memadai dan lemah hingga data pembangunan yang diinput sering hilang. Hal ini mengakibatkan inefisiensi waktu dalam menginput program kegiatan karena mengakibatkan input secara berulang. Selain itu, tidak adanya pusat bantuan dari pemerintah pusat apabila pelaksana SIPD dari daerah ingin berkonsultasi mengenai permasalahan yang dihadapi sehingga menimbulkan kebingungan.

Hasil penelitian terdahulu memiliki perbedaan dengan penelitian ini baik dalam lokasi, waktu dan konteks penelitian, penelitian terdahulu menunjukkan beberapa membahas mengenai SDM yang kurang menguasai penggunaan SIPD sehingga berpengaruh terhadap perencanaan penganggaran dan penginputan data serta permasalahan teknis yang mengakibatkan inefisiensi penggunaan SIPD. Tetapi belum ada yang menyoroti aspek tersebut dari segi peran BAPPERIDA sebagai coordinator perencanaan Pembangunan menurut Inu Kencana Syafie (2013) sebagai regulator, dinamisator dan fasilitator. Penelitian ini juga ingin mengetahui mengapa Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung terlambat dalam melakukan penginputan rencana kegiatan ke dalam SIPD sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan BAPPERIDA.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, kualitas SDM pengguna SIPD di dua OPD Kota Bandar Lampung belum optimal, sehingga berdampak pada ketersediaan informasi perencanaan pembangunan yang menjadi bahan bagi BAPPERIDA dalam menyusun dokumen perencanaan.

Sehubungan dengan itu, pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana peran BAPPERIDA dalam perencanaan pembangunan daerah melalui SIPD di Kota Bandar Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Peran BAPPERIDA dalam Perencanaan Pembangunan Melalui SIPD
2. Untuk Mendeskripsikan Masalah Implementasi SIPD dalam Perencanaan Pembangunan di Kota Bandar Lampung

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan bidang Ilmu Pemerintahan, khususnya dalam mengkaji permasalahan penginputan rencana kegiatan oleh SDM dalam SIPD dan mengetahui fungsi BAPPERIDA sebagai koordinator, dinamisor dan fasilitator perencanaan Pembangunan melalui SIPD, mengingat pentingnya SIPD untuk merencanakan, mencatat, dan menyimpan data serta informasi program pembangunan daerah dalam satu sistem terintegrasi. Dengan demikian, penelitian ini membuka peluang gagasan baru serta referensi bacaan mengenai peran lembaga/organisasi dan SDM dalam perencanaan pembangunan melalui pelaksanaan tugas sesuai ketentuan kebijakan,

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah menyediakan wawasan dan pengetahuan mendalam tentang SIPD di BAPPERIDA Kota Bandar Lampung. Hal ini dapat menjadi bahan bacaan yang bermanfaat bagi pembaca umum, sehingga pembaca memahami pentingnya peran BAPPERIDA dalam mengoordinasikan SDM dalam penginputan rencana kegiatan di SIPD guna mendukung perencanaan program pembangunan daerah dan penguatan koordinasi. Dengan itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar evaluasi dan perbaikan dalam penggunaan dan perbaikan SIPD.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Peran Kelembagaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Peran adalah sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan/kepentingan banyak orang. Achmad Santosa (2013), mengatakan “peran adalah perilaku atau tindakan oleh sekelompok orang, badan atau lembaga yang karena status atau kedudukan yang dimiliki memberikan pengaruh pada lingkungan tersebut”.

Mashun dalam Achmad Santosa (2013) menyatakan bahwa peran juga sebagai bagian dari keberadaan kelompok yang mempengaruhi kepentingan banyak orang. Dalam hal ini peran dalam sektor publik sebagai sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang dan jasa kelompok kepentingan. Jadi munculnya sektor publik berawal dari adanya kebutuhan masyarakat secara bersamaan terhadap barang atau layanan tertentu. Penyediaan jasa dan layanan tertentu biasanya disediakan oleh sekelompok yang memiliki kewenangan dan legitimasi yang disebut pemerintah.

Soekanto mengatakan bahwa “peran sebagai aspek dinamis kedudukan (status), seseorang yang melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peran” (Rifka dkk, 2024). Peran juga mencakup tiga hal yaitu :

- a. Peran berkaitan dengan norma-norma yang melekat pada kedudukan atau posisi seseorang dalam masyarakat.
- b. Peran merupakan gambaran mengenai tindakan atau aktivitas yang dapat dilakukan oleh individu dalam kehidupan bermasyarakat.

- c. Peran dapat dipahami sebagai perilaku individu yang memiliki arti penting dalam membentuk struktur sosial masyarakat.

Hidayatullah dalam Rifka (2024) menyatakan peran sebagai:

- a. Merupakan bagian dari tugas yang harus dijalankan dalam suatu proses manajemen.
- b. Menggambarkan pola penilaian yang diharapkan sesuai dengan suatu kedudukan atau status.
- c. Menunjukkan peran atau fungsi seseorang dalam suatu kelompok atau lembaga.
- d. Merupakan fungsi yang diharapkan dari seseorang yang menjadi ciri atau karakter yang melekat pada dirinya.
- e. Menunjukkan fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.

Riyadi dalam Brigitte Lantaeda dkk (2002) mengatakan bahwa peran juga diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak atau oposisi sosial. Dengan peran atau fungsinya, diharapkan akan bekerja sesuai dengan harapan orang atau lingkungan. “Peran tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya). Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam organisasi” (Brigitte Lantaeda dkk, 2002).

Riyadi dan Bratakusumah dalam Soares (2015) menyatakan bahwa “pemerintah daerah sebagai peran perencana yaitu mendesain dan membentuk interaksi dalam suatu proses menuju sasaran yang ingin dicapai, sehingga pemerintah berperan utama dalam tugas dan pokok sesuai visi, misi, sasaran dan tujuan yang diterapkan”. Peranan Pemerintah dalam pembangunan masyarakat bersifat operasional sampai pada hal yang bersifat ideologi dan spritual, pemerintah mempunyai wewenang dan kemampuan melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai seorang pemimpin dalam menyelesaikan permasalahan (Ndraha dalam Soares, 2015).

Dalam Penelitian ini, aspek kelembagaan difokuskan pada BAPPERIDA Kota Bandar Lampung sebagai lembaga koordinator perencanaan pembangunan menggunakan SIPD. Secara khusus Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah di BAPPERIDA berfungsi sebagai koordinator yang menyusun dokumen perencanaan secara makro, dengan memanfaatkan data dan informasi yang dikumpulkan dari seluruh OPD di Kota Bandar Lampung. Input data oleh OPD sebagai dasar perencanaan pembangunan, tetapi keterbatasan pemahaman SDM mengenai alur perencanaan yang berpengaruh terhadap penyusunan dokumen perencanaan oleh BAPPERIDA. Penelitian ini bertujuan untuk melihat faktor yang membuat SDM di OPD mengalami kendala di SIPD sehingga sering terlambat dari batas waktu yang ditentukan. Selain itu juga, apakah BAPPERIDA telah memberikan peringatan dan pelatihan terhadap OPD di Kota Bandar Lampung mengingat salah satu peran BAPPERIDA sebagai penyelenggaraan pembinaan teknis sehingga OPD menginput data ke dalam SIPD sesuai *timeline* yang ditentukan.

Jones dan Mashun dalam Achmad Santosa (2013) menyatakan bahwa organisasi sektor publik memiliki empat peran yaitu:

- a. *Regulatory role*, yaitu peran dalam menetapkan aturan yang diperlukan oleh masyarakat agar penggunaan barang dan layanan publik dapat berjalan secara tertib dan adil. Dalam hal ini, sektor publik memiliki fungsi penting dalam menyusun kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Tanpa adanya regulasi yang jelas dari lembaga publik, berpotensi terjadi ketimpangan karena tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap barang dan layanan yang seharusnya bersifat publik.
- b. *Enabling role*, tujuan akhir dari sebagian besar regulasi adalah memungkinkannya segala aktivitas masyarakat berjalan secara aman, tertib dan lancar. Sektor publik mempunyai peran yang cukup besar dalam memperlancar aktivitas masyarakat yang beraneka ragam

tersebut. Hal ini sebagai perwujudan dari rencana kegiatan atau program pemerintah yang disusun dan ditetapkan sebagai urusan pemerintahan bersifat wajib maupun sesuai kondisi daerah.

- c. *Direct provision of goods and services*, yaitu peran sektor publik dalam penyediaan barang dan jasa kepada masyarakat. Seiring dengan semakin luas dan kompleksnya sektor publik, sebagian kegiatan mulai melibatkan mekanisme pasar melalui proses privatisasi. Dalam kondisi ini, sektor publik tetap memiliki peran penting dalam mengatur kegiatan produksi dan distribusi barang maupun jasa, termasuk barang publik dan quasi publik. Selain itu, sektor publik juga berfungsi melakukan pengawasan dan pengendalian melalui regulasi agar penyelenggaraan pelayanan tidak merugikan masyarakat.
- d. Penyedia Layanan (*Service Provider*) pemerintah berperan sebagai penyedia layanan sebagai upaya memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan sebuah strategi untuk memberikan perubahan nyata sesuai kebutuhan dan kepentingan publik.

Terdapat beberapa Dimensi Peran menurut Achmad Santosa (2013) yaitu sebagai berikut:

- a Peran sebagai kebijakan, yaitu peran dipandang sebagai suatu kebijakan yang tepat dan layak untuk dilaksanakan.
- b Peran sebagai strategi, yaitu peran digunakan sebagai upaya untuk memperoleh dukungan dari masyarakat.
- c Peran sebagai alat komunikasi, yaitu peran dimanfaatkan sebagai sarana untuk memperoleh informasi atau masukan dalam proses pengambilan keputusan.
- d Peran sebagai alat penyelesaian sengketa, Peran digunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada.

Bruce J. Cohen dalam Li dan Teori (2014) menyatakan ada beberapa jenis peran yaitu sebagai berikut:

- a. Peranan nyata (*Enacted Role*), yaitu cara yang benar-benar dilakukan oleh seseorang atau kelompok dalam menjalankan perannya.
- b. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*), yaitu peran yang diharapkan oleh masyarakat untuk dijalankan oleh seseorang sesuai dengan kedudukannya.
- c. Konflik peranan (*Role Conflict*), yaitu kondisi ketika seseorang memiliki lebih dari satu peran dengan tuntutan yang saling bertentangan.
- d. Kesenjangan peranan (*Role Distance*), yaitu adanya jarak atau ketidaksesuaian antara peran yang dijalankan dengan keterlibatan emosional individu.
- e. Kegagalan peran (*Role Failure*), yaitu ketidakmampuan seseorang dalam menjalankan peran yang seharusnya dilakukan.
- f. Model peranan (*Role Model*), yaitu perilaku seseorang yang dijadikan contoh dan ditiru oleh orang lain.
- g. Rangkaian peranan (*Role Set*), yaitu hubungan seseorang dengan pihak lain dalam menjalankan perannya.

Inu Kencana Syafie (2013) menyatakan ada tiga aspek peran pemerintah yakni:

- a. Pemerintah sebagai Regulator yaitu menyiapkan arahan untuk menyeimbangkan implementasi pembangunan melalui regulasi. BAPPERIDA bertugas menyusun aturan main/regulasi terkait implementasi sebuah kebijakan di tingkat Kota Bandar Lampung. Menerbitkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang jadwal penginputan, menyusun pedoman teknis penyusunan RKPD melalui SIPD, serta menetapkan batasan waktu (*deadline*) yang efektif. Apabila tidak dipatuhi oleh OPD yang bersangkutan, maka

BAPPERIDA berhak memberikan sanksi sesuai kapasitasnya dalam mengkoordinasikan OPD di Kota Bandar Lampung.

- b. Pemerintah sebagai Dinamisator adalah mendorong partisipasi masyarakat jika terjadi kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan menjaga momentum pembangunan daerah. Pemerintah juga sebagai penggerak kemajuan pelayanan publik untuk pembangunan yang berkelanjutan. BAPPERIDA sebagai koordinator pembangunan harus mampu menggerakkan OPD yang pasif dan mendampingi OPD selama proses penginputan. Dalam fakta lapangan, ini terlihat saat BAPPERIDA melakukan monitoring harian secara intensif terhadap progres input dan memberikan "teguran" atau motivasi kepada OPD yang progresnya masih 0% agar selaras dengan tahapan perencanaan nasional.
- c. Pemerintah sebagai Fasilitator, peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang mengarah pada implementasi pembangunan dalam rangka menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, dalam konteks penelitian ini, BAPPERIDA wajib menyediakan sarana prasarana (seperti *help desk*) dan bantuan teknis. Jika ada operator/SDM yang tidak paham alur, peran fasilitator dibuktikan apakah mereka menyediakan bimbingan teknis menyediakan materi panduan, atau menyediakan pendampingan asistensi yang merata pada seluruh OPD untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan operator/perencana dalam OPD di Kota Bandar Lampung.

Di sisi lain terdapat Teori Institusional oleh W. Richard Scott (2014) menekankan pada "tiga pilar utama yang menopang keberlanjutan organisasi yaitu regulatif, normatif, dan kultural-kognitif. Pilar ini menyoroti peran aturan formal dan sanksi dalam mengendalikan perilaku organisasi; pilar normatif menekankan nilai, standar, dan kewajiban sosial, termasuk tuntutan untuk

menjamin inklusivitas pelayanan; sedangkan pilar kultural-kognitif menekankan pada kerangka berpikir bersama yang membentuk persepsi masyarakat.

Sinergi ketiga pilar inilah yang menciptakan legitimasi sebuah institusi publik serta memastikan transformasi pelayanan publik berjalan tidak hanya efisien, tetapi juga inklusif dan berkeadilan sosial” (Dama, 2025). Di samping itu, teori insititusional ini menekankan pada organisasi yang tetap berjalan sesuai dengan tujuannya yang mampu mengikuti kebijakan dan aturan formal serta memiliki kontrol terhadap perilaku organisasi dibawahnya serta melaksanakan tugas sesuai aturan atau dasar hukum yang ditetapkan.

Pilar normatif berarti nilai standar dan kewajiban suatu organisasi sehingga terbentuk pola kerja yang efektif terhadap pelaksanaan tugas. Selanjutnya pilar kultural-kognitif yaitu bagaimana organisasi melaksanakan tugas untuk mewujudkan tujuan bersama termasuk dalam memuaskan *output* terhadap sasaran yang dituju. Kemampuan SDM dalam organisasi menjadi hal signifikan sebagai penggerak organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akibat pemenuhan tugas pelayanan yang profesional kepada masyarakat.

Terdapat juga Indikator dalam Teori Edward III dalam Jurnal Akib (2010) mengenai implemetasi kebijakan yang salah satu faktor nya berkaitan dengan struktur birokrasi yaitu bagaimana standar operasional yang ditetapkan untuk mengatur pelaksanaan kebijakan. Struktur Birokrasi, walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakannya, namun bisa saja kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi yakni apabila terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak, ketika struktur birokrasi tidak kondusif, maka hal ini

akan menyebabkan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan.

2.2 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Dalam KBBI Sistem diartikan sebagai “perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas”. Sedangkan Informasi adalah “penerangan; pemberitahuan; kabar atau berita tentang sesuatu”. Sistem dan Informasi adalah dua kata yang sering digunakan untuk memberikan makna mengenai kombinasi antara perangkat, data dan sumber daya manusia untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan dan mendistribusikan data guna mendapatkan sebuah informasi yang berguna bagi kelompok pengguna dan pengelola.

“Informasi dianggap tidak memiliki kegunaan praktis bila tidak dioperasionalkan, dan informasi hanya dapat dioperasionalkan melalui komunikasi” (Amar Ahmad, 2012). Komunikasi yang dimaksud tidak selalu berbicara secara langsung atau betatap muka antar individu tetapi dapat dilakukan dengan koordinasi dan tersedianya ruang untuk saling memantau dan mengakses informasi antar organisasi.

Sistem Informasi adalah bagian dari perkembangan dan perubahan dari sistem yang manual ke sistem yang serba cepat mudah dan efektif. Sistem Informasi adalah sebuah sistem berbasis teknologi untuk mengumpulkan dan menyimpan data untuk diolah menjadi informasi. Penggunaan teknologi adalah bagian dari sistem informasi modern dengan fitur lebih canggih yang menawarkan banyak pilihan dan membantu mempercepat pekerjaan manusia di dunia yang menuntut lebih cepat.

Dalam konteks ini pemerintah daerah terutama dalam perencanaan pembangunan, diimplementasikan dengan kehadiran SIPD sebagai forum dan instrumen dalam penginputan program kegiatan SIPD sebagai dasar informasi pembangunan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 Tentang

Sistem Informasi Pembangunan Daerah Pasal 1 Ayat 11 berisi “Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik”.

Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 Tentang SIPD dalam Pasal 1 ayat 9 menyatakan “Sistem Informasi Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah”. Hasil dari data dalam SIPD sebagai bahan perencanaan dalam penyusunan dokumen perencanaan berbasis elektronik.

Dalam Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang SIPD 1 ayat 12 berisi “Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah”. Ayat 15 berisi “Informasi Pembangunan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan Profil Pembangunan Daerah”.

Analisis yang dimaksud terdapat pada Ayat 13 yaitu “Analisis Pembangunan Daerah adalah penjabaran atas hasil pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional serta hubungan antara pembangunan daerah dengan pembangunan daerah lainnya”. Sedangkan Profil Pembangunan Daerah terdapat pada Ayat 14 “Profil Pembangunan Daerah adalah gambaran umum kondisi perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan

nasional”. Pasal 6 ayat 1 dan 2 yang berisi “SIPD dibangun dan dikembangkan untuk menghasilkan layanan informasi pemerintahan daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elektronik dan diakses melalui situs resmi Kemendagri”.

Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD, bahwa Permendagri ini diundangkan pada 27 September 2019 ini mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang diundangkan satu tahun sebelumnya yaitu pada 5 Oktober 2018. Penggantian ini karena Permendagri Nomor 98 Tahun 2018 belum mengatur informasi pemerintahan daerah dalam satu sistem yang terhubung. Dengan diterbitkannya SIPD pada Tahun 2019, sebagai komitmen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyusun dan integrasi data dari berbagai daerah di Indonesia dengan kontrol pada pembuat kebijakan yaitu Kemedagri.

SIPD adalah bagian dari perencanaan dan analisis yang tersistem dalam website. Informasi pemerintahan daerah dapat disatukan ke dalam sebuah sistem yang dirancang dan disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Dalam Pasal 2 Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 menyatakan ruang lingkup SIPD yaitu, “Informasi Pembangunan Daerah, Informasi Keuangan Daerah dan Informasi Pemerintah Daerah lainnya”. Pemerintah daerah wajib menyediakan SIPD sebagai bentuk komitmen dan kepatuhan terhadap peraturan Menteri agar perencanaan pembangunan dapat tersistem dan terarah. OPD sebagai satuan kerja yang terbagi dari berbagai bidang dan urusan pemerintahan, memiliki sejumlah program dan rencana kerja yang dilaporkan kepada BAPPERIDA sebagai badan yang menyusun perencanaan pembangunan dalam jangka pendek, menengah dan panjang.

Koordinasi antara BAPPERIDA dan setiap OPD di Kota Bandar Lampung sebagai hubungan kemitraan karena BAPPERIDA sebagai pengelola proses penyelenggaraan pembangunan daerah melalui rencana kerja setiap OPD yang diinput dalam SIPD mengenai urusan masing-masing OPD.

Ruang lingkup SIPD mencakup informasi pembangunan daerah memuat data perencanaan pembangunan daerah, analisis dan profil pembangunan daerah, dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang datanya dikelola dalam data dan informasi perencanaan pembangunan berbasis elektronik yang memenuhi prinsip satu data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mendapatkan data perencanaan pembangunan, ada beberapa tahapan dimulai dari perencanaan data, pengumpulan data, pengisian data, dan pemeriksaan data berbasis elektronik yang dikoordinasikan oleh Bappeda/BAPPERIDA, Produsen Data dan Wali Data yang tergabung dalam kelompok pengelolaan data.

Hasil dari informasi perencanaan yang dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan daerah akan dituangkan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan yang dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan setiap daerah seperti yang tertuang dalam Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang SIPD Pasal 14 ayat (2) yaitu:

1. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
2. rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
3. rencana pembangunan tahunan daerah

Selain informasi pembangunan daerah, SIPD juga memuat data informasi keuangan pembangunan daerah yang diatur dalam Pasal Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, yakni:

1. informasi perencanaan anggaran daerah;
2. informasi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah;
3. informasi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
4. informasi pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah;
5. informasi barang milik daerah; dan
6. informasi Keuangan Daerah lainnya.

Berjalannya pelaksanaan SIPD di setiap daerah, tentunya ada pengawasan dan pembinaan dari pemerintah yang lebih tinggi terhadap pelaksanaan SIPD di setiap daerah, hal ini terdapat pada Pasal (28) mengenai Pembinaan dan Pengawasan yakni:

- a. Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan SIPD di tingkat provinsi.
- b. Gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan SIPD di kabupaten/kota.
- c. Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui proses pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan SIPD.
- d. Sementara itu, pengawasan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam merencanakan pembangunan SIPD sebagai sarana dalam perencanaan modern berbasis elektronik, “pesatnya perkembangan teknologi menjadi catatan bagi pemerintah agar terus meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas dalam pemecahan berbagai permasalahan pemerintahan yang semakin kompleks secara mendasar dan berkesinambungan, terutama dalam upaya mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat” (Islah, 2018).

Implementasi SIPD yang tidak bisa berjalan apabila tidak ada koordinasi antara pelaksana SIPD di OPD yang satu dengan di OPD yang lainnya, karena harus sinkronisasi program kerja dengan anggaran yang tersedia serta dengan program pemerintah pusat sebagai acuan penyusunan rencana kerja pemerintah daerah yang dikoordinasikan oleh BAPPERIDA. Implementasi SIPD tidak lepas dari kemampuan dan kepatuhan SDM di OPD dalam menginput dan menyelesaikan tahapan kegiatan program dalam SIPD sehingga penyusunan dokumen perencanaan dapat berjalan sesuai *timeline* yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah masing-masing.

Dalam Jurnal Pesak dkk (2021), tujuan SIPD adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan serta pengambilan keputusan, baik di tingkat daerah maupun pusat.
- b. Mempermudah proses pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah.
- c. Menyediakan data dan informasi sebagai dasar dalam penyusunan arah serta kebijakan pembangunan daerah.
- d. Mendukung penentuan prioritas permasalahan di suatu wilayah.
- e. Meningkatkan kualitas kebijakan publik yang dihasilkan.
- f. Mendorong pengembangan potensi ekonomi daerah.

Dengan demikian, SIPD menjadi alternatif dan kebutuhan setiap daerah dalam proses administrasi dan penyusunan dan pengelolaan data informasi pembangunan dan keuangan di daerah, hal ini sejalan dengan yang dilakukan oleh BAPPERIDA Kota Bandar Lampung sebagai bagian dari amanat Permendagri Nomor 70 Tahun 2019. Keberadaan SIPD diharapkan memberikan kemudahan, efisiensi waktu, transparansi dan sinkronisasi yang baik dalam penyusunan dokumen pembangunan daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.

Peran BAPPERIDA dalam koordinasi OPD sangat signifikan sehingga diperlukan adanya dorongan dan tindak lanjut apabila OPD lambat dalam melakukan penginputan di SIPD, permasalahan ini juga tidak lepas dari SDM di OPD sehingga pentingnya kontrol dan evaluasi apakah kesalahan pada sistem atau pada waktu yang diberikan dalam penyelesaian penginputan kurang cukup.

2.3 Perencanaan Pembangunan Daerah

Sebelum dilaksanakan pembangunan, tentunya ada perencanaan yang matang untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat dalam bentuk kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih

baik. Tarigan dalam Manghayu (2018) mengatakan bahwa Perencanaan adalah proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang.

UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mendefinisikan “perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat menurut urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia” (Sipd dkk., 2021). Tahap perencanaan sesuai dengan kebutuhan daerah dan anggaran yang tersedia, hal ini bertujuan untuk memberikan kontribusi secara nyata dan meminimalisir terjadinya kegagalan dan inefektivitas dalam penggunaan anggaran dan sumber daya yang dimiliki suatu daerah. “Perencanaan untuk menentukan tujuan yang akan dicapai di masa mendatang serta apa yang harus dilaksanakan agar dapat mencapai tujuan tersebut” (Terry & Rue dalam Afifah dkk., 2023).

Brigette Lantaeda, dkk (2002) menyatakan bahwa “pembangunan bisa terlaksana secara menyeluruh terarah dan terpadu, maka diperlukan perencanaan yang cukup matang yang disesuaikan dengan tujuan ingin dicapai agar apa yang hendak dilaksanakan benar-benar terwujud dengan baik”. “Pembangunan daerah merupakan proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan”. (Sipd dkk., 2021).

Perencanaan pembangunan dalam hal ini pada Kota Bandar Lampung, sebagai salah satu Kota di Indonesia yang memiliki penduduk sekitar 1.077.664 (Bandar Lampung dalam Angka, 2025) harus memanfaatkan sumber daya yang berpotensi, untuk memastikan kesejahteraan hidup masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945. Perencanaan dalam sebuah daerah akan diikuti dengan pembangunan atas pilihan atau alternatif yang ditentukan. Sehingga pentingnya ada koordinasi dan kerjasama antara pemangku kepentingan dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah

daerah bersama OPD yang membawahi urusan masing-masing guna menciptakan pembangunan yang merata (Sipd dkk., 2021).

Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah Pasal 1 Ayat 5 menyatakan “Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia”. Pembangunan adalah bagian dari perubahan, terdapat perbedaan dari sebelum dan sesudah dilakukan pembangunan yang memberikan dampak positif perkembangan suatu daerah. Pembangunan juga sebagai bagian dari proses atau tindakan untuk mengubah dan memperbaiki aspek secara fisik maupun non-fisik.

“Perencanaan pembangunan daerah haruslah disokong dengan implementasi pemerintahan daerah yang merata dan berkesinambungan dengan arah pembangunan yang terencana dengan baik dan dinamis” (Brigitte Lantaeda dkk, 2002). Pasal 1 Ayat 6 menyatakan “Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu”.

Pasal 274 UU Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa, “Perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)”. Hal ini sejalan dengan penerapan SIPD dalam perencanaan pembangunan daerah di Kota Bandar Lampung sebagai bentuk kepatuhan pemerintah daerah terhadap amanat Permendagri mengenai pemerintah daerah harus menggunakan SIPD sebagai prasarana dalam perencanaan pembangunan berbasis elektronik. *Output* dari perencanaan yaitu dokumen perencanaan yang didapatkan dari data dan

informasi yang telah dikelola dan disesuaikan dengan sumber daya dan kemampuan sebuah daerah.

Soares (2015) menyatakan “perencanaan pembangunan daerah adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan di masa depan dalam hal ini berawal dari tahapan-tahapan proses penyusunan program dan aktivitas yang melibatkan berbagai elemen didalamnya, demi pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dengan tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dalam suatu lingkungan atau wilayah yang direncanakan dalam jangka waktu tertentu”.

Proses pembangunan daerah dilakukan dengan adanya survey mengenai pengumpulan dan identifikasi kebutuhan daerah, selanjutnya data mengenai pembangunan tersebut diselaraskan dengan tujuan pembangunan secara nasional, agar tidak terjadi tumpang tindih atau kebijakan yang bertolak belakang antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pembangunan sebagai bagian dari kepentingan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat suatu daerah baik dari urusan pemerintahan dasar dan urusan pemerintahan pilihan. Perencanaan pembangunan di zaman sekarang ini dengan menggunakan teknologi sebagai sebuah sistem yang dapat membantu efektivitas dan efisiensi dalam perencanaan pembangunan secara akurat.

Dione (2020) mengatakan keberhasilan pembangunan daerah ditentukan oleh koordinasi yang baik antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah karena adanya informasi yang akurat. Hal ini sesuai dengan adanya penerapan SIPD dalam pengelolaan informasi pembangunan dan keuangan daerah di BAPPERIDA Kota Bandar Lampung. SIPD sebagai sarana yang digunakan dalam menyimpan dan mengelola data informasi pembangunan dan keuangan daerah dan sarana koordinasi dengan pemerintah pusat untuk evaluasi sinkronisasi data.

Informasi dalam perencanaan pembangunan daerah, dalam Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Pasal (16) mencakup “kondisi geografis daerah, demografi, potensi sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah”. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, karena keberhasilan pembangunan daerah menjadi bagian dari keberhasilan pembangunan nasional dan keunggulan pembangunan daerah itu sendiri sebagai bagian dari prestasi pencapaian pembangunan secara nasional.

Kuncoro dalam Sudianing (2020) mengatakan kecepatan dan ketepatan “Perencanaan Pembangunan sangat dibutuhkan agar dapat mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan, mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh dengan lebih menekankan pada keberpihakan kepada masyarakat, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana prasarana ekonomi, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender”. Hal ini didukung oleh penggunaan teknologi untuk menghimpun dan menyimpan data perencanaan melalui SIPD.

Riyadi dan Bratakusumah dalam Manghayu (2018) mengatakan faktor-faktor dalam perencanaan pembangunan terdiri dari faktor lingkungan, faktor sumber daya manusia, faktor sistem, faktor ilmu pengetahuan dan faktor pendanaan. Kelima faktor tersebut memberikan kontribusi dan menjadi penentu keberhasilan tahapan dalam proses pembangunan mulai dari dukungan lingkungan yang memungkinkan, kesiapan dan kuantitas sumber daya manusia, strategi dalam mencapai keberhasilan pembangunan, ilmu dan pengetahuan dalam mewujudkan strategi serta sumber daya keuangan yang cukup.

Conyers dalam Manghayu (2018) mengatakan bahwa pelaku atau orang yang terlibat dalam perencanaan pembangunan yaitu administrator yang mengambil keputusan. BAPPERIDA kota Bandar Lampung sebagai koordinator

perencanaan pembangunan dalam Lingkup Pemerintah Kota Bandar Lampung. Mahi dan Trigunarso dalam Sudianing (2020) mengatakan bahwa pembangunan adalah upaya berkesinambungan menciptakan keadaan yang dapat menyediakan lebih banyak alternatif yang sah bagi setiap warga negara untuk mencapai aspirasi yang mencakup kepentingan banyak individu. Dalam teori perencanaan ada tiga hal yang harus dipahami yakni:

- a. Definisi perencanaan, yaitu perencanaan dipahami sebagai bagian dari aktivitas manusia dalam berbagai tingkatan masyarakat. Perencanaan merupakan proses berpikir dan bertindak yang berorientasi ke masa depan, dilakukan secara rasional melalui pemilihan tindakan, serta berfungsi sebagai upaya pemecahan masalah secara spesifik.
- b. Substansi perencanaan, yaitu berkaitan dengan apa yang direncanakan dan kepada siapa perencanaan tersebut ditujukan.
- c. Normatif perencanaan, yaitu berkaitan dengan bagaimana perencanaan disusun serta alasan yang mendasari penyusunannya.

Getz dan *Clean Urban Project* dalam Mahi dan Trigunarso yang dikutip dari Sudianing (2020) menyatakan bahwa fungsi kritis perencanaan pembangunan daerah adalah :

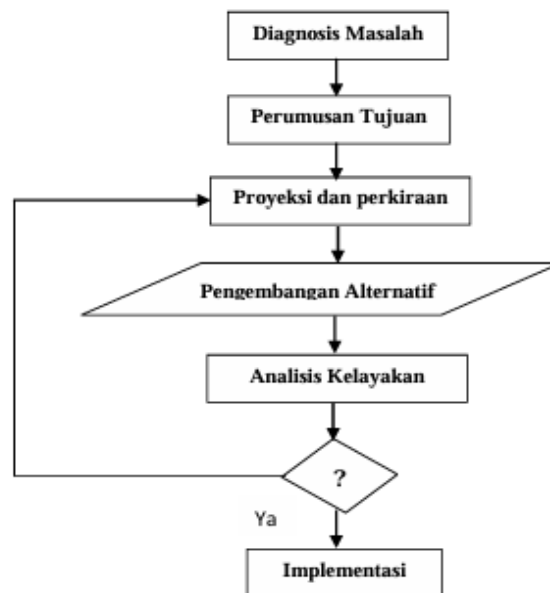
- a. Penetapan kerangka perencanaan yang efektif.
- b. Pelaksanaan sistem pemantauan (monitoring) terhadap proses perencanaan.
- c. Penerapan sistem perencanaan daerah yang partisipatif dan fleksibel.
- d. Penguatan fungsi dalam proses penganggaran.
- e. Perumusan visi daerah sebagai arah pembangunan.
- f. Penyusunan rencana dan program baik jangka menengah maupun tahunan.

- g. Pemantauan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan.
- h. Integrasi berbagai pendekatan atau aliran dalam perencanaan.
- i. Pembentukan hubungan antara unsur politik dan eksekutif dalam proses perencanaan.
- j. Penetapan mekanisme koordinasi baik antar daerah maupun di dalam daerah.
- k. Perancangan program pengembangan kapasitas dalam bidang perencanaan daerah.
- l. Penerapan mekanisme penganggaran untuk mendukung pengembangan kapasitas.

Proses perencanaan dengan model sistem digambarkan oleh Mahi dan Trigunarso dalam Sudianing (2020) sebagai berikut:

1. Diagnosis masalah, yaitu mencari masalah yang ada secara tepat dengan isu yang ada, sehingga menemukan alternatif permasalahan untuk mendukung keberhasilan pencapaian tujuan perencanaan
2. Perumusan tujuan, bergantung pada perumusan masalah yang tepat sebelum dilaksanakannya perencanaan yang lebih lanjut
3. Proyeksi dan perkiraan yaitu hal-hal yang kemungkinan akan terjadi baik positif maupun negatif dari berbagai alternatif yang tersedia di masa yang akan datang.
4. Pengembangan alternatif; yaitu proses penyusunan berbagai pilihan yang akan dipertimbangkan dalam perencanaan. Kualitas keputusan yang dihasilkan sangat ditentukan oleh kualitas alternatif yang tersedia dan dipilih dalam proses tersebut.
5. Analisis kelayakan, yaitu tahap penilaian terhadap berbagai alternatif dengan mempertimbangkan aspek politik, ekonomi, dan sosial. Proses ini bertujuan untuk menentukan pilihan yang paling layak sehingga keputusan perencanaan dapat dilakukan secara tepat.

6. Evaluasi yaitu penilaian kembali dari alternatif yang sudah ditetapkan untuk memastikan bahwa alternatif tersebut dapat mendukung perencanaan lebih baik dan efisien
7. Pelaksanaan, yaitu komitmen politis yang kuat dan tampaknya menjadi persyaratan utama dalam pelaksanaan setiap keputusan yang berorientasi pada hasil.



Gambar 2 Model Perencanaan (Mahi dan Trigunarso)

Sumber: Sudianing (2020)

2.4 Kerangka Pikir

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penting yang membantu pemerintah daerah mengarahkan sumber daya mereka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ini menjadi bagian dari otonomi daerah, di mana dokumen perencanaan seperti RPJMD dan RKPD disusun dengan melihat kebutuhan masyarakat dan berbasis data melalui visi misi kepala

daerah. Pencapaian visi misi tersebut sebagai bahan OPD untuk melaksanakan rencana kegiatan tahunan.

Dalam Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD menekankan penggunaan teknologi informasi untuk mengintegrasikan data dari berbagai OPD, sehingga perencanaan menjadi lebih akurat dan efisien. Secara kelembagaan, BAPPERIDA Kota Bandar Lampung memainkan peran utama sebagai lembaga teknis yang mengkoordinasikan seluruh proses perencanaan.

Berdasarkan Pasal 240 UU Nomor 23 Tahun 2014, BAPPERIDA bertugas “mengumpulkan, menganalisis, dan menyatukan data dari semua OPD untuk membentuk rencana pembangunan secara keseluruhan yang selaras antara visi nasional dan kebutuhan daerah”. Data tersebut diolah menjadi Informasi Pembangunan seperti yang ditegaskan dalam Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, Pasal 7 ayat (1) bahwa Informasi Pembangunan Daerah paling sedikit memuat:

- a. data perencanaan pembangunan daerah;
- b. analisis dan Profil Pembangunan Daerah;
- c. dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Peran ini bukan hanya soal menyusun dokumen, tapi juga memantau pelaksanaannya agar masyarakat daerah bisa merespons perubahan sosial-ekonomi, seperti peningkatan infrastruktur dan layanan masyarakat di Bandar Lampung. SIPD sebagai instrumen penting dalam mendukung pelaksanaan peran BAPPERIDA, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 15 Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 yang mewajibkan penggunaan sistem berbasis teknologi dalam pengelolaan data pembangunan daerah. SIPD yang dikembangkan oleh Kemendagri berfungsi sebagai sistem terintegrasi untuk menyimpan, mengolah, dan menyajikan data rencana program dan kegiatan pemerintah daerah. Namun, implementasi SIPD di Kota Bandar Lampung masih menghadapi sejumlah kendala, terutama keterlambatan penginputan data oleh SDM pada masing-masing OPD, yang berpotensi mempengaruhi

kualitas informasi pembangunan daerah. Sehingga penelitian ini juga mengkaji peran BAPPERIDA sebagai instansi yang menyelenggarakan pembinaan teknis perencanaan daerah, khususnya dalam memberikan arahan serta tindakan pembinaan berupa peringatan atau sanksi kepada OPD yang terlambat melakukan penginputan data dalam SIPD.

Konsep peran pemerintah sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator menjadi relevan untuk memahami dinamika pelaksanaan SIPD. Sebagai regulator, BAPPERIDA memiliki tanggung jawab untuk memastikan kesesuaian input perencanaan dengan regulasi. Sebagai dinamisator, peran ini mencerminkan pentingnya penggerakan dan koordinasi antar OPD agar proses penginputan data tetap berjalan meskipun terdapat kendala dalam penginputan seperti waktu atau pemahaman penggunaan sistem oleh SDM di OPD. Sementara itu, sebagai fasilitator, peran ini terkait dengan upaya menciptakan kondisi yang mendukung kelancaran penggunaan SIPD, termasuk BAPPERIDA memberikan pelatihan atau forum terhadap operator SIPD di setiap OPD terkait dengan penggunaan sistem dan cara menghadapi kemungkinan kesalahan dalam penginputan, selain itu juga BAPPERIDA memberikan arahan yang jelas terkait SOP penggunaan SIPD kepada setiap OPD. Keterkaitan konsep peran tersebut dengan SIPD menunjukkan bahwa Peran BAPPERIDA dalam SIPD adalah peran kelembagaan sebagai koordinator perencanaan pembangunan yang harus mengelola sistem, mengkoordinasikan OPD, dan menindaklanjuti keperlambatan penginputan OPD dengan tantangan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan dan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung.



Gambar 3 Kerangka Pikir Penelitian

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Ghozali (2019) mengatakan “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan dan menghubungkan dengan variabel lain”. Sedangkan “Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah” (Moleong dalam Ghozali, 2019). Penelitian Kualitatif menurut Hendriyadi merupakan proses penyelidikan naturalistik yang mencari pemahaman mendalam tentang fenomena sosial secara alami (Ghozali, 2019).

Penelitian kualitatif menurut Ghozali juga “menekankan pada kualitas bukan kuantitas dan data-data yang dikumpulkan bukan berasal dari kuesioner melainkan berasal dari wawancara, observasi langsung dan dokumen resmi yang terkait lainnya”. Penelitian kualitatif pada BAPPERIDA Kota Bandar Lampung dan dua OPD pelaksana SIPD untuk mengetahui permasalahan yang terdapat dalam SIPD, sehingga upaya BAPPERIDA dalam mengatasi kendala SDM di OPD dalam keterlambatan penginputan di SIPD.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian berfungsi sebagai objek utama yang memberikan arah jelas terhadap titik masalah dalam topik yang dibahas. Hal ini menjadi sangat penting karena membantu peneliti menentukan data yang diperlukan, teori yang sesuai, serta batasan-batasan dalam studi. Dengan demikian, fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Peran BAPPERIDA Kota Bandar Lampung sebagai koordinator perencanaan pembangunan melalui SIPD
2. Faktor penghambat penginputan rencana kegiatan SIPD oleh operator OPD di Kota Bandar Lampung

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini sebagai tempat peneliti untuk mendapatkan informasi mengenai masalah yang diteliti dan informan yang ikut dan terlibat langsung dalam pelaksanaan SIPD. Lokasi Penelitian ini di BAPPERIDA Kota Bandar Lampung. Alasan peneliti karena BAPPERIDA sebagai OPD yang mengkoordinasikan perencanaan pembangunan di suatu daerah yang data dan informasinya dihimpun dan dikelola dalam SIPD. Setiap OPD yang mengatur mengenai urusan pemerintahan wajib dan pilihan akan menginput program rencana kegiatan ke dalam SIPD sebagai acuan BAPPERIDA menyusun dokumen perencanaan tahunan.

3.4 Sumber Data

Mustofa (2015) mengatakan bahwa sumber data yaitu segala sesuatu yang menyangkut informasi mengenai data. Sumber data sebagai instrumen dalam pengambilan informasi mengenai penelitian. Sumber data terdiri dari dua yaitu primer dan sekunder.

3.4.1 Data Primer

Data Primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari orang/kelompok yang terlibat dalam masalah yang diteliti. Hal ini BAPPERIDA kota Bandar Lampung sebagai sebagai lembaga teknis perencanaan pembangunan melalui SIPD. Menurut Sugiyono “data primer yaitu sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpul data” (Ghozali, 2019). Data Primer pada penelitian ini bersumber dari Informan yang berasal dari pegawai yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan SIPD di BAPPERIDA Kota Bandar Lampung dan pelaksana SIPD di Dinas Pemberdayaan dan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung.

3.4.2 Data Sekunder

Data Sekunder menurut Sugiyono adalah “sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen”. Sumber data yang didapatkan dari sumber lain seperti internet, buku, jurnal, peraturan perundang-undangan atau literatur lainnya yang mendukung dan memperkuat teori serta konsep yang relevan dengan topik masalah yang diambil.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono mengatakan pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah, pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden pada suatu seminar, diskusi, di jalan dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sekunder (Ghozali, 2019).

Yusuf dalam Ghozali (2019) mengatakan keberhasilan dalam pengumpulan data banyak ditentukan oleh kemampuan peneliti menghayati situasi sosial

yang dijadikan fokus penelitian. Pengumpulan data diambil dari sumber penelitian yang primer dan sekunder yaitu dari wawancara dan studi dokumen.

3.5.1 Wawancara

Menurut KBBI, wawancara merupakan “proses tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya tentang suatu hal”. Wawancara bertujuan memperoleh data dengan berbicara langsung kepada pelaksana atau orang yang terlibat dalam topik yang diangkat dalam penelitian. Pertanyaan wawancara dalam penelitian ini, masih berhubungan dengan masalah yang diangkat serta memberikan jawaban dari teori yang dipakai sebagai alat analisis penelitian. Dalam hal ini pelaksana SIPD hingga pegawai yang ikut dalam pengelolaan SIPD di BAPPERIDA, Dinas Pemberdayaan dan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung. Berikut beberapa Informan Wawancara dalam Penelitian.

Tabel 1 Data Informan Wawancara Penelitian SIPD BAPPERIDA Kota Bandar Lampung

No	Nama	Jabatan	Alasan Pemilihan Informan
1	Sugandi Z.A, S.Kom., M.M	Pelaksana SIPD BAPPERIDA Kota Bandar Lampung	Terlibat langsung dalam operasional input data SIPD di BAPPERIDA.
2	Muhammad Mahyudi C.	Pelaksana SIPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat	Sebagai salah satu OPD yang memiliki kendala menginput data di SIPD.
3	Tri Indah	Pelaksana SIPD Dinas Tenaga Kerja	Sebagai salah satu OPD yang memiliki kendala menginput data di SIPD

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025

3.5.2 Studi Dokumen

Studi dokumen menurut Sugiyono dalam Ghozali (2019) adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data serta menganalisis informasi melalui buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Hal ini untuk memperkuat gagasan penulis dalam mendapatkan penjelasan mengenai konsep dan teori dalam topik penelitian. Penulis mempelajari dokumen yang erat kaitannya dengan masalah yang diangkat untuk memperluas perspektif dan pemahaman penulis mengenai topik tersebut. Studi Dokumen dalam Penelitian ini juga di dapat dari Permendagri tentang SIPD, Perwali Bandar Lampung Tentang Lokasi Penelitian, serta Undang-Undang maupun bacaan mengenai Perencanaan Pembangunan yang mendukung konsep dalam Penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data menurut John W. Tukey merupakan sebuah prosedur dalam menganalisis data, teknik-teknik untuk menginterpretasikan hasil-hasil dari analisis, serta didukung oleh proses pengumpulan data untuk membuat analisis tersebut menjadi lebih mudah, lebih tepat, dan juga lebih akurat (Dian, 2017). Tujuan dari analisis data menurut Sofian Effendi adalah untuk menyederhanakan data dalam bentuk yang lebih mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan. Metode analisis deskriptif kualitatif ialah menggambarkan, menganalisis serta meringkas berbagai kondisi, situasi dari beberapa data yang telah dikumpulkan peneliti melalui wawancara, kuesioner, maupun pengamatan secara langsung yang telah dilakukan oleh peneliti (Dian, 2017).

Analisis data memberikan kemudahan bagi pembaca memahami maksud dan tujuan peneliti untuk memberikan informasi yang sudah dikelola dan disusun dalam bentuk tulisan yang mudah dipahami. Hasil penelitian dengan mengumpulkan data secara langsung maupun studi dokumen yang

dihubungkan dengan teori bagaimana idealnya masalah yang diangkat dalam topik penelitian.

Moleong dalam Ghozali (2019) menyatakan analisis data adalah “proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data”. Teknik analisis data yang digunakan dalam analisis kualitatif memiliki tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan yang terakhir adalah tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi.

3.6.1 Reduksi Data

Sugiyono dalam Ghozali (2019) mengatakan Reduksi data adalah “merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yang sesuai dengan topik penelitian, mencari tema dan polanya, pada akhirnya memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya”. Hal ini bertujuan agar tidak melebarinya fokus penelitian yang mengakibatkan ketidaksesuaian antara konsep, teori dan hasil yang akan dicapai, sehingga peneliti harus memilih apa saja data yang diperlukan guna mendukung data yang akurat untuk penelitian.

3.6.2 Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman, penyajian data ialah “sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan” (Dian, 2017). Setelah adanya reduksi atau pemilahan data yang sesuai dengan kebutuhan, maka penyajian data sebagai hasil dari data yang sudah diolah dan dimasukkan dalam tabel, *flowchart* dan grafik yang memudahkan pembacaan dan pemahaman terhadap data yang sudah disusun secara sistematis.

3.6.3 Penarikan Kesimpulan

Sugiyono dalam Ghozali (2019) menyatakan “kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan perumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan”. Seiring berjalannya penelitian, ada hal-hal yang peneliti temukan belum jelas sehingga ketika berjalannya penelitian mampu menjawab ketidakpastian tersebut.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Moleong dalam Sugiyono (2010) mengatakan ini merupakan “teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data, untuk melakukan pengecekan atau pembandingan terhadap data tersebut”. Penelitian ini membandingkan informasi yang didapat dari informan yang satu dengan informan yang lain ketika wawancara, observasi atau studi dokumen. Norman (2009) dalam Alaslan dkk (2023) mengatakan bahwa triangulasi sebagai “gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda”. Hal ini bertujuan agar jawaban dari penelitian memiliki jawaban yang baik dari beberapa sudut pandang yang telah terbukti konsisten.

Zuldafrial (2021) mengatakan keabsahan data adalah “derajat kepercayaan atau kebenaran hasil suatu penelitian. Lincoln dalam Wijaya mengatakan keabsahan data di dalam penelitian kualitatif, suatu realistik itu bersifat majemuk dan dinamis, sehingga tidak ada yang konsisten dan berulang seperti semula” (Zuldafrial, 2021). Pada Penelitian ini menggunakan teknik Triangulasi Sumber dan Triangulasi Teknik.

3.7.1 Triangulasi Sumber

Zuldafril (2021) mengatakan bahwa Triangulasi Sumber yang digunakan untuk menguji dan mengecek data yang di dapat dari berbagai sumber seperti mewawancarai beberapa informan dan mencari sumber lainnya sebagai sebuah rujukan dan memperkuat hasil penelitian. Sugiyono dalam Hadi (2019) mengungkapkan bahwa triangulasi sumber adalah “membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif”. Pada penelitian ini triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan temuan penelitian dari dua OPD yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung, sehingga diketahui permasalahan yang dihadapi SDM penggunaan SIPD dalam penginputan rencana kegiatan OPD dalam sistem.

3.7.2 Triangulasi Teknik

Zuldafril (2021) mengatakan “menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data dari sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Pada penelitian ini, peneliti membandingkan data yang didapat dari sumber sama tetapi dengan teknik wawancara atau dokumentasi”. Jadi apabila terdapat perbedaan hasil dari sumber yang sama tetapi teknik data berbeda maka dapat di diskusikan lebih lanjut kepada sumber data. Pada penelitian ini, triangulasi teknis dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan dokumentasi yang dimana keterlambatan penginputan oleh SDM di OPD dengan pelaksanaan tugas penginputan sesuai dengan Peraturan pembuatan rencana kegiatan OPD dalam SIPD.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran BAPPERIDA dalam Perencanaan Pembangunan Melalui SIPD, dengan merujuk pada Peran sebagai Regulator, Dinamisator dan Fasilitator maka diperoleh kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian. Pertama Peran Sebagai Regulator, BAPPERIDA sudah menjalankan fungsi dalam membuat aturan dan memberikan arahan terkait penginputan SIPD melalui Surat Edaran Sekretaris Daerah dan memantau progres penginputan setiap OPD dalam sistem. Langkah ini untuk memastikan keterisian setiap data OPD sebelum batas waktu penginputan berakhir. Tetapi belum terdapat penerapan sanksi administratif sebagai konsekuensi bagi OPD yang terlambat agar lebih disiplin dalam penginputan dalam SIPD. Hal ini menunjukkan lemahnya pengendalian BAPPERIDA yang mendorong kepatuhan OPD, sehingga sebagai regulator BAPPERIDA belum sepenuhnya efektif.

Sebagai Dinamisator, BAPPERIDA juga berperan dalam mengawasi dan memperingati setiap OPD yang belum memenuhi kewajiban penginputan dalam sistem baik melalui Surat Edaran maupun secara praktis melalui telepon/pesan WhatsApp, meskipun hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan dan Dinas Tenaga Kerja masih terlambat dalam Penginputan Rencana Kegiatan dalam SIPD dikarenakan beban kerja yang bertambah. Kewajiban penginputan adalah tanggung jawab oleh PPTK, tetapi dilimpahkan ke operator. Selain itu, kendala teknis berupa server yang sering mengalami gangguan turut memperlambat penginputan karena harus menunggu sistem

kembali normal. Keberadaan Surat maupun peringatan melalui sambungan telepon tidak menjadi dorongan yang signifikan bagi OPD dalam kedisiplinan penginputan dalam sistem.

Selain itu, hal ini didukung oleh ketiadaan tim pengawasan yang terstruktur di BAPPERIDA menjadi salah satu kelemahan yang menghambat optimalisasi fungsi pergerakan, sehingga diperlukan penguatan kelembagaan agar peran dinamisor tidak hanya bersifat persuasif, tetapi juga sistematis dan berkelanjutan. Sehingga peran BAPPERIDA dalam Dinamisator belum efektif karena tidak dibarengi dengan adanya tim pengawasan terstruktur untuk memantau secara intens mengenai penginputan SIPD di sleuruh OPD Kota Bandar Lampung.

Sebagai Fasilitator, Peran BAPPERIDA belum terlaksana secara maksimal, karena Dinas Pemberdayaan dan Dinas Tenaga Kerja belum memperoleh bimbingan teknis atau pelatihan secara berkala, mengingat tugas BAPPERIDA sebagai koordinator pembangunan. Termasuk juga mengenai penggunaan SIPD serta banyaknya keluhan terkait penggunaan sistem yang dirasakan oleh OPD. Sehingga peran BAPPERIDA sangat diperlukan untuk memberikan solusi dan memberikan petunjuk tentang langkah apa yang harus dilakukan ketika OPD mengalami kendala tersebut. Tidak tersedianya tim teknis yang bersedia turun ke OPD apabila OPD tersebut mengalami kendala mejadi penyebab dari lemahnya fungsi fasilitator oleh BAPPERIDA Kota Bandar Lampung. Dengan demikian, pelatihan juga sangat diharapkan mengembalikan tugas operator SIPD sesuai *jobdesk* yaitu memeriksa isian oleh PPTK dalam sistem dan menegaskan kembali fungsi PPTK selaku pejabat teknis kegiatan dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja dan rancangan biaya program kegiatan dinas dalam SIPD.

5.2 Saran

Bedasarkan simpulan penelitian tersebut beberapa saran yang diajukan mengenai peran BAPPERIDA dalam perencanaan Pembangunan melalui SIPD adalah sebagai berikut:

- a Pemerintah Kota Bandar Lampung mengalokasikan anggaran khusus pelatihan SIPD bagi seluruh OPD, sehingga BAPPERIDA menyediakan pelatihan SDM bagian Perencana dan bimbingan teknis secara rutin terhadap OPD untuk mengatasi kendala dalam penginputan SIPD
- b BAPPERIDA menerapkan sanksi sebagai konsekuensi atas keterlambatan penginputan rencana kegiatan oleh OPD di dalam sistem guna mendorong kedisiplinan dan kepatuhan terhadap jadwal yang ditetapkan
- c Perlunya penambahan Operator SIPD dalam Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dinas Tenaga Kerja, untuk membantu optimalisasi dan ketepatan waktu dalam penyelesaian penginputan dalam SIPD
- d Adanya pelatihan secara berkala oleh Kemendagri terhadap koordinator Pembangunan di setiap daerah agar BAPPERIDA memiliki kapasitas mengatasi setiap kendala dan keluhan oleh OPD terkait penginputan dalam SIPD dan juga peningkatan jumlah Pegawai Perencana di BAPPERIDA yang memahami penggunaan SIPD. Sehingga semakin banyak tempat OPD dalam berkonsultasi ketika terjadi kendala penginputan
- e Kemendagri perlu melakukan peningkatan dan perbaikan SIPD yang sering mengalami gangguan agar tidak menghambat penginputan dalam SIPD.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Santosa. (2013). *BAB II KAJIAN PUSTAKA Kajian Teori Konsep Peran, Pengertian Peran*. 21–94.
- Afifah, S. N., Subarno, A., & Akbarini, N. R. (2023). Implementasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) untuk menunjang perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Wonosobo. *JIKAP (Jurnal Informasi Dan Komunikasi Administrasi Perkantoran)*, 7(2), 171. <https://doi.org/10.20961/jikap.v7i2.62402>
- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana HAEDAR AKIB Guru Besar Ilmu Administrasi Universitas Negeri Makassar. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1–11.
- Alaslan, A., Suharti, B., Laxmi, Rustandi, N., Sutrisno, E., & Rahmi, S. (2023). *Penelitian Metode Kualitatif*. <https://osf.io/preprints/thesiscommons/smrhb>
- Amar Ahmad. (2012). Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Kesenjangan Informasi. *Dakwah Tabligh*, 5(2), 327–336.
- Aset, D. A. N., Bpkad, D., & Tanjungpinang, K. (2023). *Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Pada Badan Pengelolaan Keuangan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Pada Dan Aset Daerah (Bpkad)*. <http://repo.stie-pembangunan.ac.id/id/eprint/343/%0Ahttp://repo.stie-pembangunan.ac.id/id/eprint/343/1/18622258.pdf>
- Azaria, D. P. (2014). (2014). Implementasi SIPD di Bappeda provinsi Lampung. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 7(2), 107–115.
- Buku Kota Bandar Lampung Dalam Angka, 2025
- Brigette Lantaeda, S., Lengkong, F. D. J., & Ruru, J. M. (2002). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 04(048), 243.
- Dama. (2025). Transformasi Pelayanan Publik yang Inklusif Melalui Pilar Institusional: Analisis Mall Pelayanan Publik Samarinda, Indonesia. 6313–6325.

- Dian, W. (2017). Metode Penelitian Metode Penelitian. *Metode Penelitian Kualitatif*, 17, 43. [http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB III.pdf](http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB%20III.pdf)
- Dione, F. (2020). Implementation of Regional Development Information System (SIPD) in Increasing Coordination of Regional Development. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 21–28. <https://doi.org/10.33701/jkp.v3i1.1061>
- Diva, Nurul. (2025). Cara Akses Aplikasi SIPD RI Ikuti Langkah-Langkah Berikut. <https://www.liputan6.com/hot/read/5891975/cara-akses-aplikasi-sipd-ri-ikuti-langkah-langkah-berikut>, diakses pada 13 April 2026
- Ghozali. (2019). Bab iii metoda penelitian. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3, 1–9.
- Hadi, S. (2019). Manajemen Sarana dan Prasarana Penjasorkes di SD Negeri Kota Bengkulu. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 57.
- Ii, B. A. B., & Teori, K. (2014). *Skripsi rezki nur alam BAB II_3 peran*. 12–28.
- Inu Kencana Syafiie, (2013) Ilmu Pemerintahan, Jakarta: Bumi Prakasa.
- Islah, K. (2018). Peluang dan tantangan pemanfaatan teknologi big data untuk mengintegrasikan pelayanan publik pemerintah. *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah Untuk ...*, 5(1), 130–138. <http://ojs.stiami.ac.id/index.php/reformasi/article/view/272%0Ahttp://ojs.stiami.ac.id/index.php/reformasi/article/viewFile/272/162>
- Manghayu, A. (2018). Perencanaan Pembangunan Partisipatif Dalam Penerapan E-Musrenbang. *Jurnal Manajemen Pembangunan*, 5(2), 95–115.
- Muhammad Nasution, N. (2021). ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KOTA MEDAN. *Journal Riset Mahasiswa (JRMx) Menurut PP*, 9(77). <http://ejournal.ukanjuruhan.ac.id>
- Mustofa. (2015). Metode Penelitian dengan NPF dan Roa. *Jurnal*, 1–9.
- Pesak, P. J., Maradesa, N. C., Banea, A. E., Gazali, A., Herman, & Salindeho, A. (2021). *Analysis of Local Government Information System (SIPD) Implementation at Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bitung City Government*. 1(1).
- Putri, & Falah. (2024). Analisis Implementasi Aplikasi SIPD RI Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Belanja Daerah Pada BPKAD Kabupaten Jayapura. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah*. 7.+Artikel+7. 9, 359–378.
- Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, I. I. J. (2024). *TINJAUAN PUSTAKA*. 2, 306–312.

- Sipd, D., Dari, D., & Struktur, A. (2021). *Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Kabupaten Tabalong*. 4(70), 732–749.
- Soares, A., Nurpratiwi, R., & Makmur, M. (2015). *Jurnal Prik*. 3.
- Sosialisasi SIPD RI – BPSDM PROVINSI RIAU*. (n.d.). Retrieved November 4, 2025, dari https://bpsdm.riau.go.id/bpsdm/sosialisasi-sipd-ri/?utm_source=chatgpt.com
- Syarifuddin, D. (2024). *Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Dalam Proses Perencanaan Pembangunan Daerah (Studi Kasus Pada Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan)*. 2, 270–282.
- Sudianing, N. ketut ketut agus S. (2020). Staf Pengajar Universitas Panji Sakti 1. *Locus Majalah Ilmiah FISIP*, 12(1), 60–69.
- Sugiyono. (2010). Teknik Analisis Data suatu penelitian. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 01(01), 1689–1699.
- Tumija, T., & Erlambang, P. A. (2023). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Perencanaan Anggaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Media Birokrasi*, 155–169. <https://doi.org/10.33701/jmb.v5i2.3696>
- Wurara, C. N. C., Sampe, S., Monintja, D. K., Mamentu, M., Pengemanan, F. N., & Rondonuwu, S. G. (2024). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kota Tomohon. *Journal Publicuho*, 7(2), 802–810.
- Zuldafrial. (2021). Buku Metodologi Penelitian Zuldafrial 2021. *Repository Stei*, 26.27. http://www.academia.edu/download/35360663/METODE_PENELITIAN_KUALITAIF.docx

Sumber dari Undang-Undang/ Peraturan Menteri:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sitem Perencanaan Pembangunan Nasional

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Pengadaan barang/Jasa pemerintah

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bandar Lampung Nomor 52 Tahun 2021 tentang SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BANDAR LAMPUNG

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bandar Lampung Nomor 46 Tahun 2021 tentang SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA KOTA BANDAR LAMPUNG

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2026